

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Adi, Rianto. 2007. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Granit. Jakarta.
- Alimoeso, Sudiby. 2011. *Kebijakan, Strategi dan Pokok-Pokok Kegiatan Sekretariat Utama Tahun 2011*. Konsultasi Bidang. Batam.
- BKKBN. 2010. *Pengelolaan Pengembangan Kapasitas Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera*. Jakarta.
- BKKBN. 2011. *Pedoman Operasional Bina Ketahanan Keluarga Lansia Dan Rentan*. Jakarta.
- BKKBN dan 'Aisyiyah. 2007. *Pelayanan KB & KR Melalui Fasilitas Kesehatan dan KB 'Aisyiyah*. Jakarta.
- Hadjon, Phillipus M. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Introduction to the Indonesian Administrative Law*. Gajah Mada University. Yogyakarta.
- HR, Ridwan. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. UII Press. Jogjakarta.
- Juanda. 2008. *Hukum Pemerintahan daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*. Alumni. Bandung.
- Kansil, C.S.T. & Christine S.T. Kansil. 2004. *Pemerintahan Daerah Indonesia. Hukum Administrasi Daerah*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Manan, Bagir. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII. Jogjakarta.
- Muhdar, Muhamad. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. PT. RajaGrasindo Persada. Jakarta.
- Nurmayani. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung.
- Soekamto, Soejono. 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Kamus

Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.

Poerwadarminta, W.J.S. 1985. *Kamus Bahasa Indonesia*. PN. Balai Pustaka .Jakarta.

Oxford University Press. 2008. *Oxford Learner's Pocket Dictionary*. China.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Peraturan Kepala Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional Provinsi.

Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, beserta beberapa kali perubahannya terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2005.

Website

Sudayasa, Putu. 2010. *3 Manfaat Utama Program Keluarga Berencana*. (online). (<http://www.puskel.com/3-manfaat-utama-program-keluarga-berencana/>), diakses tanggal 19 Oktober 2011.

Lusa. 2008. *Program KB di Indonesia*. (online).
(<http://www.lusa.web.id/program-kb-di-indonesia/>). Diakses tanggal 19 Oktober 2011.

Putra, Zulfikar. 2011. *Pengertian Pengelolaan*. (online).
(<http://www.lusa.web.id/program-kb-di-indonesia/>). Diakses tanggal 19 Oktober 2011.

Badan Pusat Statistika. (online).
(http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=12¬ab=1). Diakses tanggal 19 Oktober 2011.

Karya Ilmiah

Sulaiman, Agoes Mochammad. 2010. *Koordinasi Antara BKKBN Provinsi Lampung Dan SKPD Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Program KB Di Provinsi Lampung*. Tesis. Fakultas Hukum. Universitas Lampung. Bandar Lampung.